

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XII



DINAS SOSIAL



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
d. Bab IV : Penutup.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025, diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut:

1. Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2. Perubahan Renja PD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam perubahan KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun berjalan (2025);
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- 5 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
- 6 Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
- 7 Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;
- 8 Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renja ini adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial tahun 2023 - 2026.
2. Merumuskan program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial.
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun dan keselarasan program dan kegiatan Dinas Sosial dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan RKPD.

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 1 dan Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.3 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 2 dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun 2025 Renja Dinas Sosial terdapat 6 Program, 13 Kegiatan, dan 37 Sub kegiatan dengan total anggaran sejumlah Rp9.167.873.802,00 pada penetapan dan berkurang sejumlah Rp295.807.502,00 menjadi Rp8.872.066.300,00 pada pergeseran efisiensi. Dari total pagu tersebut, sampai dengan akhir Semester I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4.325.304.961,00 dengan rincian anggaran masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp)	PAGU PERGESERAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.577.377.402	5.708.735.900	2.875.622.811
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	8.000.000	1.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	8.000.000	1.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.384.478.552	4.715.511.252	2.521.965.298
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.367.158.552	4.698.191.252	2.521.965.298
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.320.000	17.320.000	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	16.858.900
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	16.858.900
Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.650.900	202.660.900	69.104.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	10.000.000	5.904.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.750.900	45.750.900	10.276.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.000.000	60.000.000	29.780.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.000.000	16.000.000	5.897.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	1.500.000	700.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	5.000.000	3.331.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.900.000	64.410.000	13.215.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.636.100	119.190.060	-
Pengadaan Mebel	11.727.200	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.908.900	119.190.060	-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.371.850	306.633.688	126.123.462
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	15.000.000	1.553.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.068.744	54.657.688	24.944.015
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.303.106	236.976.000	99.625.547
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.240.000	306.740.000	140.070.351
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000	130.000.000	48.370.291
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	27.000.000	6.562.410
Pemeliharaan Mebel	9.000.000	6.000.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.500.000	29.000.000	13.711.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	68.281.650
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000	14.740.000	3.145.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	810.451.600	655.457.300	242.865.574
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	810.451.600	655.457.300	242.865.574
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	186.450.000	105.000.000	104.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.860.000	134.860.000	57.413.174
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	183.529.000	181.600.000	28.960.600
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	295.414.600	223.799.300	44.198.300
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.198.000	10.198.000	8.293.500
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.189.933.800	1.136.830.800	545.461.415
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	824.933.800	807.997.800	542.054.415
Penyediaan Permakanan	434.762.800	434.762.800	394.987.600
Penyediaan Alat Bantu	30.071.000	30.071.000	20.032.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	95.000.000	78.064.000	7.800.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	265.100.000	265.100.000	119.234.815

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	365.000.000	328.833.000	3.407.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35.000.000	26.000.000	-
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	330.000.000	302.833.000	3.407.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.277.995.000	1.212.640.000	596.676.861
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.277.995.000	1.212.640.000	596.676.861
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	269.355.000	222.000.000	66.770.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.008.640.000	990.640.000	529.906.861
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	70.000.000	35.195.000	17.360.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	35.195.000	17.360.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70.000.000	35.195.000	17.360.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	242.116.000	123.207.300	47.318.300
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.116.000	123.207.300	47.318.300
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.116.000	123.207.300	47.318.300
TOTAL	9.167.873.802	8.872.066.300	4.325.304.961

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial sampai dengan akhir Triwulan 2 tahun 2025, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan disajikan pada Form E.81(terlampir). Berdasarkan form E.81 dapat disampaikan bahwa:

- Realisasi Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp11.054.614.232,00 dari total pagu anggaran Rp12.028.744.511,00 atau sebesar 91.90%;
- Pagu Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp9.064.736.945,00 atau turun Rp2.964.007.566,00 dibandingkan tahun 2023, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp8.651.212.413,00 atau sebesar 95.44%;
- Realisasi anggaran tahun 2025 sampai dengan akhir triwulan 2 Rp4.325.304.961,00 dari total pagu anggaran Rp8.872.066.300,00 atau sebesar 48.75%;
- Indikator program tahun 2024 telah sesuai dengan target pada Renstra dan secara keseluruhan telah tercapai melampaui target, dan target yang sama digunakan sebagai acuan capaian sampai dengan triwulan 2 tahun 2025.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penentuan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Provinsi. Berdasarkan telaah analisa permasalahan, isu- isu penting Dinas Sosial Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- 1. Peralihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data sasaran berkaitan dengan perangkungan kesejahteraan (desil) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
- 2. Minimnya pendanaaan APBD sehingga memerlukan dukungan jejaring mitra dan lembaga sebagai kerangka pendanaan alternatif pelayanan kesejahteraan sosial;
- 3. Belum terpenuhinya standar kompetensi PSM/Relawan Sosial yang memiliki sertifikat SDM Kesejahteraan Sosial;
- 4. Belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai penanganan orang terlantar.

2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Rancangan awal renja Perubahan 2025 pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU PENETAPAN	PAGU PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN RENJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.577.377.402	5.708.735.900	5.755.585.095
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	8.000.000	8.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	8.000.000	8.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.384.478.552	4.715.511.252	4.762.360.447
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.367.158.552	4.698.191.252	4.745.040.447
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.320.000	17.320.000	17.320.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.650.900	202.660.900	202.660.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.750.900	45.750.900	45.750.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.000.000	60.000.000	60.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.000.000	16.000.000	16.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	1.500.000	1.500.000

Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000	5.000.000	5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.900.000	64.410.000	64.410.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.636.100	119.190.060	119.190.060
Pengadaan Mebel	11.727.200	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.908.900	119.190.060	119.190.060
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.371.850	306.633.688	306.633.688
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	15.000.000	15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.068.744	54.657.688	54.657.688
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.303.106	236.976.000	236.976.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.240.000	306.740.000	306.740.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	27.000.000	27.000.000
Pemeliharaan Mebel	9.000.000	6.000.000	6.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.500.000	29.000.000	29.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000	14.740.000	14.740.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	810.451.600	655.457.300	655.457.300
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	810.451.600	655.457.300	655.457.300
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	186.450.000	105.000.000	105.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.860.000	134.860.000	134.860.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	183.529.000	181.600.000	181.600.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	295.414.600	223.799.300	223.799.300
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.198.000	10.198.000	10.198.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.189.933.800	1.136.830.800	1.136.830.800
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	824.933.800	807.997.800	807.997.800
Penyediaan Permakanan	434.762.800	434.762.800	434.762.800
Penyediaan Alat Bantu	30.071.000	30.071.000	30.071.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	95.000.000	78.064.000	78.064.000

Pemberian Layanan Kedaruratan	265.100.000	265.100.000	265.100.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	365.000.000	328.833.000	328.833.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35.000.000	26.000.000	26.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	330.000.000	302.833.000	302.833.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.277.995.000	1.212.640.000	1.212.640.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.277.995.000	1.212.640.000	1.212.640.000
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	269.355.000	222.000.000	222.000.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.008.640.000	990.640.000	990.640.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	70.000.000	35.195.000	35.195.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	35.195.000	35.195.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70.000.000	35.195.000	35.195.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	242.116.000	123.207.300	123.207.300
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.116.000	123.207.300	123.207.300
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.116.000	123.207.300	123.207.300
TOTAL	9.167.873.802	8.872.066.300	8.918.915.495

Terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp46.849.195,00 yang dialokasikan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sedangkan kebutuhan anggaran pada beberapa sub kegiatan diperhitungkan dengan pergeseran anggaran antar rekening belanja dalam sub kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada perubahan rencana kerja Dinas Sosial tahun 2025 tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran mengacu pada resntra yang telah ditetapkan, capaian masing-masing indikator pada tahun 2024 telah melampaui target RKPD 2024. Target RKPD 2025 sesuai dengan acuan pada Renstra, dan tidak berubah pada target perubahan RKPD 2025. Gambaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025 digambarkan pada tabel berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS		%	97,01	95,5	95,5
			Cakupan penduduk terdata DTKS yg ditangani	%	92,72	80	80
			Angka Kemiskinan	%	4.578	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2025. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2025 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp)	PAGU PERGESERAN (Rp)	RENCANA PERUBAHAN RENJA (Rp)	+/-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.577.377.402	5.708.735.900	5.755.585.095	46.849.195
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	8.000.000	8.000.000	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	8.000.000	8.000.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.384.478.552	4.715.511.252	4.762.360.447	46.849.195
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.367.158.552	4.698.191.252	4.745.040.447	46.849.195
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.320.000	17.320.000	17.320.000	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.650.900	202.660.900	202.660.900	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	10.000.000	10.000.000	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.750.900	45.750.900	45.750.900	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.000.000	60.000.000	60.000.000	-
Penyediaan Barang Cetak dan	23.000.000	16.000.000	16.000.000	-

Pengandaan				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	1.500.000	1.500.000	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	5.000.000	5.000.000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.900.000	64.410.000	64.410.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.636.100	119.190.060	119.190.060	-
Pengadaan Mebel	11.727.200	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.908.900	119.190.060	119.190.060	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.371.850	306.633.688	306.633.688	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	15.000.000	15.000.000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.068.744	54.657.688	54.657.688	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.303.106	236.976.000	236.976.000	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.240.000	306.740.000	306.740.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000	130.000.000	130.000.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	27.000.000	27.000.000	-
Pemeliharaan Mebel	9.000.000	6.000.000	6.000.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.500.000	29.000.000	29.000.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000	14.740.000	14.740.000	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	810.451.600	655.457.300	655.457.300	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	810.451.600	655.457.300	655.457.300	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	186.450.000	105.000.000	105.000.000	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.860.000	134.860.000	134.860.000	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	183.529.000	181.600.000	181.600.000	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	295.414.600	223.799.300	223.799.300	-
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.198.000	10.198.000	10.198.000	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.189.933.800	1.136.830.800	1.136.830.800	-
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	824.933.800	807.997.800	807.997.800	-
Penyediaan Permakanan	434.762.800	434.762.800	434.762.800	-

Penyediaan Alat Bantu	30.071.000	30.071.000	30.071.000	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	95.000.000	78.064.000	78.064.000	-
Pemberian Layanan Kedaruratan	265.100.000	265.100.000	265.100.000	-
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	365.000.000	328.833.000	328.833.000	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35.000.000	26.000.000	26.000.000	-
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	330.000.000	302.833.000	302.833.000	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.277.995.000	1.212.640.000	1.212.640.000	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.277.995.000	1.212.640.000	1.212.640.000	-
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	269.355.000	222.000.000	222.000.000	-
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.008.640.000	990.640.000	990.640.000	-
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	70.000.000	35.195.000	35.195.000	-
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	35.195.000	35.195.000	-
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70.000.000	35.195.000	35.195.000	-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	242.116.000	123.207.300	123.207.300	-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.116.000	123.207.300	123.207.300	-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.116.000	123.207.300	123.207.300	-
TOTAL	9.167.873.802	8.872.066.300	8.918.915.495	46.849.195

Terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp46.849.195,00 yang dialokasikan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sedangkan kebutuhan anggaran pada beberapa sub kegiatan diperhitungkan dengan pergeseran anggaran antar rekening belanja dalam sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial pada kawasan perkotaan dengan karakteristik sub urban di Kota Salatiga memiliki muatan kompleksitas baik pada aspek kemiskinan, keterlantaran, marjinalisasi, diskriminasi dan eksploitasi. Upaya kesejahteraan sosial yang berbasis pada perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial merupakan pondasi dasar untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, urusan sosial sebagai urusan konkuren yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pemenuhan hak dasar bagi setiap warga masyarakat.

Tantangan terkini berupa transformasi pendataan sasaran layanan kesejahteraan sosial yang semula Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan integrasi Pensasaran Kemiskinan Ekstrem (PKE)-BKKBN, Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek)-BPS, dan DTKS-Kementerian Sosial, pada perkembangannya berpotensi memunculkan ketidaksinkronan antara pemeringkatan kesejahteraan (desil) dengan kondisi riil di lapangan. Proses normalisasi ditempuh melalui pendataan berbasis partisipasi kelembagaan masyarakat ditingkat RT/RW/kelurahan demi menjaga nilai objektivitas dan keadilan sosial.

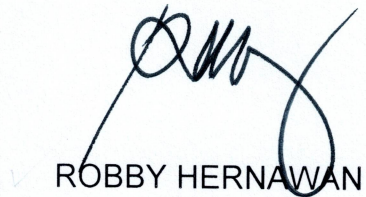
Kerangka pendanaan dengan fiskal terbatas ditengah tuntutan efisiensi pada semua sektor mendorong Dinas Sosial untuk semakin mengembangkan jejaring kemitraan dan kerja sama strategis baik antar lembaga, komunitas, kelompok bahkan perorangan semata demi mendapatkan pendanaan alternatif dalam pemenuhan layanan sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama respon kasus yang bersifat kedaruratan (kontijensi) baik dikarenakan faktor keterantaran, kesakitan maupun bencana.

Sinergitas antara Dinas Sosial dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan pada aspek kualitas melalui peningkatan kompetensi berupa sertifikasi SDM kesejahteraan sosial. Dengan demikian diharapkan ke depan layanan sosial dasar dan lanjutan yang diselenggarakan bagi PPKS dapat memenuhi jaminan mutu sesuai indikator SPM.

Pada aspek regulasi, proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan tertib tuna sosial diharapkan menjadi lanskap dan legalitas pada tataran operasionalisasi penanganan sosial secara komprehensif dan tuntas (terminasi). Melalui basis regulasi yang mantap diharapkan

terbangun sistem, sumberdaya personel, sarana prasarana, kerangka pendanaan, dan budaya hukum masyarakat yang memadai bagi terwujudnya Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Nyaman (Hatti Beriman) sebagai sesanti kondisi kota yang diidealkan.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Formulir E.81.
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Salatiga
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial /Kota Salatiga
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (Tahun 203)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n- 1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6)+(12)		(14)=(13)/(5) x 100 %		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)																				(15)	
1	Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas	100	660.000.000	89,4	1.095.002.029	63,0	622.360.576	100,00	132.786.587	100,00	242.865.574					100,00	242.865.574	189,36	1.337.867.603	189,36	37	Dinas Sosial
			Presentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	57,69		37,037		42		100		100						100		137,037	-	237,54		
			Presentase PSKS yang dibina	82		93,03		75		98,86		98,86						98,86		191,89	-	234,012		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSKS yang berkembang kapasitasnya	307	660.000.000	351	1.095.002.029	351	622.360.576	242	132.786.587	242	242.865.574					242	242.865.574		1.337.867.603			
		Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	226	186.000.000	205	175.270.700	208	141.550.000		104.000.000		104.000.000						104.000.000		279.270.700			
		Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/Kota	4	87.000.000	4	103.192.379	4	126.280.576		28.786.587		57.413.174						57.413.174		160.605.553			
		Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50	175.000.000	100	421.530.350	25	104.280.000		-		28.960.600						28.960.600		450.490.950			
		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	26	177.000.000	26	395.008.600	5	250.250.000		-		44.198.300						44.198.300		439.206.900			
		Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota					0					8.293.500						8.293.500					
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96	2.428.000.000	96,81	3.355.968.100	97,2	1.345.003.000	97,61	3.952.331	97,61	596.676.861					97,61	596.676.861	97,61	3.952.644.961	101,677	25	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot	Presentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96	2.428.000.000	96,81	3.355.968.100	97,2	1.345.003.000	97,61	3.952.331	97,61	596.676.861					97,61	596.676.861		3.952.644.961			
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	97000	725.000.000	81000	692.388.100	88200	164.210.000		540.000		66.770.000						66.770.000		759.158.100			
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15675	1.703.000.000	12428	2.663.580.000	12689	1.180.793.000		3.412.331		529.906.861						529.906.861		3.193.486.861			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n- 1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				(5)		(6)		(7)		I		II		III		IV		(12)		(13)=(6)+(12)		(14)=(13)/(5) x 100 %		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	100	931.000.000	100	2.345.917.522	100	1.168.148.000	100	125.148.446	100	545.461.415					100	545.461.415	100	545.461.415	100	59	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti																					
			Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100		100		100		100		100						100		100	-	100		
			Persentase (%) Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100		100		100		100		100						100		100	-	100		
			Persentase (%) Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100		100		100		100		100						100		100	-	100		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	641.000.000	100	952.282.757	100	1.031.000.000	100	125.148.446	100	542.054.415					100	542.054.415		1.494.337.172			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/ kota	330	171.000.000	1310	586.276.184	800	648.237.000		62.574.223		394.987.600						394.987.600		981.263.784			
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	10	23.000.000	16	30.293.900	13	19.523.000		-		20.032.000						20.032.000		50.325.900			
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	240	203.000.000	25	57.977.700	40	65.799.000		2.600.000		7.800.000						7.800.000		65.777.700			
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	270	244.000.000	180	277.734.973	200	297.441.000		59.974.223		119.234.815						119.234.815		396.969.788			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	290.000.000	100	127.758.625	100	137.148.000		-		3.407.000						3.407.000		131.165.625			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n- 1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (14)=(13)/(5) x 100 %		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12)		(13)=(6)+(12)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)																				(15)
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab/Kota	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	50	152.000.000	0	-	0	-			-		-					-			-	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40	138.000.000	34	127.758.625	19	137.148.000			-		3.407.000					3.407.000		131.165.625		
		Program Penanganan Bencana	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	259.000.000	100	51.869.500	100	38.803.000	100	5.920.000	100	17.360.000					100	17.360.000	100	17.360.000	100	7
			Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100		100		100		100		100						100		100	-		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	259.000.000	100	51.869.500	100	38.803.000	100	11.625.000	100	17.360.000					100	17.360.000		69.229.500		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	259.000.000	81	51.869.500	46	38.803.000		11.625.000		17.360.000						17.360.000		69.229.500		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	103.000.000	100	187.675.858	100	139.529.548	100	22.518.650	100	47.318.300					100	47.318.300	100	234.994.158	100	46
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	103.000.000	1	187.675.858	1	139.529.548		22.518.650		47.318.300						47.318.300		234.994.158		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	103.000.000	1	187.675.858	1	139.529.548		22.518.650		47.318.300						47.318.300		234.994.158		
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,5	6.665.680.000	87,085	5.601.719.841	89,5	5.596.892.821	89,91	1.292.441.036	89,91	2.875.622.811					89,91	2.875.622.811	86,01	2.875.622.811	95,0387	43
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	25.000.000	5	13.003.500	6	8.000.000		750.000		1.500.000						1.500.000		14.503.500		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n- 1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6)+(12)		(14)=(13)/(5) x 100 %		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	6	25.000.000	5	13.003.500	6	8.000.000		750.000		1.500.000					1.500.000		14.503.500				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	5.650.000.000		4.419.894.239	12	4.759.065.929		1.191.966.053		2.521.965.298					2.521.965.298		6.941.859.537				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	46	5.625.000.000	33	4.399.734.239	36	4.740.881.929		1.191.966.053		2.521.965.298					2.521.965.298		6.921.699.537				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	25.000.000	12	20.160.000	12	18.184.000				-					-		20.160.000				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	37.000.000		29.923.060	12	46.000.000	-			16.858.900					16.858.900		46.781.960				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	37.000.000	6	29.923.060	7	46.000.000	-			16.858.900					16.858.900		46.781.960				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		35.000.000															-				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	-				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	30	35.000.000															-				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	286.680.000		211027780	12	194.956.000		12.002.000		69.104.800					69.104.800		280.132.580				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	15.000.000	1	9.995.000	1	8.000.000	-			5.904.300					5.904.300		15.899.300				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		43.680.000			1												-				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	25.000.000	1	17.496.100	1	14.000.000	-			10.276.600					10.276.600		27.772.700				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2	65.000.000	1	52.720.700	1	59.746.000		679.000		29.780.000					29.780.000		82.500.700				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	1	27.000.000	1	20.105.900	1	13.700.000	-			5.897.400					5.897.400		26.003.300				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7	4.000.000	2	1.675.000	2	1.110.000	-			700.000					700.000		2.375.000				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	7.000.000	15	2.475.000	20	3.000.000		1.715.000		3.331.000					3.331.000		5.806.000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	100.000.000	139	106.560.080	40	95.400.000		9.608.000		13.215.500					13.215.500		119.775.580				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		270.000.000		348.230.780	12	-	-			-					-		348.230.780				
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		70.000.000															-				
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000	2	348.230.780	0	-				-					-		348.230.780				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya					11	154.000.000	-			-					-						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	362.000.000		325.294.946	12	348.070.892		70.102.553		126.123.462					126.123.462		451.418.408				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Komitmen dan kerjasama pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Pelaksanaan kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi belum dilakukan pencairan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*)	Perhitungan perencanaan dengan lebih cermat

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS SOSIAL								10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				90 %	90 %	6.806.269.016,00	5.577.377.402,00	5.755.585.095,00	-6.806.269.016,00							0,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	14 Bulan	5.543.919.166,00	4.384.478.552,00	4.762.360.447,00	-781.558.719,00			-	- -	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	5.526.599.166,00	4.367.158.552,00	4.745.040.447,00	-781.558.719,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	17.320.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	01 Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat 01 Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	50.324.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-324.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	50.324.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				32 orang	32 orang	69.127.000,00	0,00	0,00	-69.127.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				33 Orang	33 Orang	69.127.000,00	0,00	0,00	-69.127.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	253.900.000,00	293.650.900,00	202.660.900,00	-51.239.100,00			-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	61.750.900,00	45.750.900,00	23.750.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	62.000.000,00	62.000.000,00	60.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	16.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulungan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	123.900.000,00	123.900.000,00	64.410.000,00	-59.490.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 kegiatan	2 kegiatan	200.387.000,00	160.636.100,00	119.190.060,00	-81.196.940,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	51.478.100,00	11.727.200,00	0,00	-51.478.100,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	148.908.900,00	148.908.900,00	119.190.060,00	-29.718.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	353.371.850,00	353.371.850,00	306.633.688,00	-46.738.162,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	65.068.744,00	65.068.744,00	54.657.688,00	-10.411.056,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	268.303.106,00	268.303.106,00	236.976.000,00	-31.327.106,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	320.240.000,00	320.240.000,00	306.740.000,00	-13.500.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	36.500.000,00	36.500.000,00	29.000.000,00	-7.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
1		NON URUSAN							10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	14.740.000,00	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment Persentase PSKS yang dibina Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas				81.77 50 80 % % %	50 80 81.77 % % %	1.347.538.000,00	810.451.600,00	655.457.300,00	-46.088.000,00							1.301.450.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.347.538.000,00	810.451.600,00	655.457.300,00	-692.080.700,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	PSKS		1.301.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				226 Orang	208 Orang	186.450.000,00	186.450.000,00	105.000.000,00	-81.450.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			186.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	134.860.000,00	134.860.000,00	134.860.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Keluarga	50 Keluarga	613.673.000,00	183.529.000,00	181.600.000,00	-432.073.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			470.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Lembaga	28 Lembaga	402.357.000,00	295.414.600,00	223.799.300,00	-178.557.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			470.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Sertifikat	200 Sertifikat	10.198.000,00	10.198.000,00	10.198.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				100 100 % %	100,00 100 100 100.00 100 persen % % % % persen	1.295.171.000,00	1.189.933.800,00	1.136.830.800,00	-1.295.171.000,00							0,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100 %	100 %	830.171.000,00	824.933.800,00	807.997.800,00	-22.173.200,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Orang	800 Orang	440.000.000,00	434.762.800,00	434.762.800,00	-5.237.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	30.071.000,00	30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	95.000.000,00	95.000.000,00	78.064.000,00	-16.936.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	150 Orang	265.100.000,00	265.100.000,00	265.100.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100 %	100 %	465.000.000,00	365.000.000,00	328.833.000,00	-136.167.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	20 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	26.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				34 Dokumen	2 Dokumen	430.000.000,00	330.000.000,00	302.833.000,00	-127.167.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi				95 %	95 %	944.851.000,00	1.277.995.000,00	1.212.640.000,00	-944.851.000,00							0,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi				95 %	95 %	944.851.000,00	1.277.995.000,00	1.212.640.000,00	267.789.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Pendata, Dhuafa, Keluarga miskin penerima santunan kematian, penerima manfaat PKH, OPD terkait		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				61361 Orang	61361 Orang	567.851.000,00	269.355.000,00	222.000.000,00	-345.851.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				13482 Keluarga	13482 Keluarga	377.000.000,00	1.008.640.000,00	990.640.000,00	613.640.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	35.195.000,00	-70.000.000,00							0,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	35.195.000,00	-34.805.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Tagana, Masyarakat korban bencana		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				95 Orang	95 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	35.195.000,00	-34.805.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				100 %	100 %	242.116.000,00	242.116.000,00	123.207.300,00	10.884.000,00							253.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				100 %	100 %	242.116.000,00	242.116.000,00	123.207.300,00	-118.908.700,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	TMP Dharma Kota Salatiga		253.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	242.116.000,00	242.116.000,00	123.207.300,00	-118.908.700,00	Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			253.000.000,00	DINAS SOSIAL
			J U M L A H						10.705.945.016,00	9.167.873.802,00	8.918.915.495,00	-1.787.029.521,00							1.554.450.000,00	